

EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR CANDI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Mariyatul Qiftiah¹, Munawarah², Irza Setiawan³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: mrytlqfth@gmail.com

ABSTRAK

Kurangnya kesadaran para pedagang mematuhi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pasal 24 ayat 2, tidak tersedianya tempat parkir dan kurangnya pengawasan dalam penertiban pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penertiban pedagang kaki lima di pasar candi kelurahan sungai malang kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil dari penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 11 orang. Uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik dilihat dari aspek Efektivitas indikator hasil yang diinginkan dan tujuan sudah baik. Aspek Efisiensi indikator usaha yang diperlukan belum baik dan indikator manfaat bersih sudah baik. Aspek Kecukupan indikator pencapaian hasil dan efektivitas tetap masih belum baik. Aspek Pemerataan indikator manfaat merata pada kelompok sudah baik dan indikator pelayanan public cukup baik. Aspek Responsivitas indikator hasil kebijakan memuaskan kebutuhan sudah baik dan indikator mencakup cukup baik. Aspek Ketepatan indikator kebijakan dan sesuai perencanaan sudah baik.

Kata Kunci: Penertiban, Pasar, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

The lack of awareness of traders comply with policies regarding public order and public peace in article 24 paragraph 2, unavailability of parking spaces and lack of supervision in controlling street vendors. The aim of this research is to determine the evaluation of controlling street vendors in the temple market, Sungai Malang sub-district, Amuntai Tengah sub-district, Hulu Sungai Utara district. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data source was taken from purposive sampling, totaling 11 people. Data credibility tests include extending observations, increasing persistence, triangulation, analyzing negative cases, using reference materials and member checking. The results of this research indicate that the evaluation of the control of street vendors (PKL) in Candi Market, Sungai Malang Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency is quite good, as can be seen from the aspect of effectiveness of indicators of desired results and objectives. The efficiency aspect of the required business indicators is not good and the net benefit indicator is good. The adequacy aspect of indicators for achieving results and effectiveness is still not good. The aspect of equal distribution of benefit indicators across groups is good and public service indicators are quite good. The responsiveness aspect of the policy outcome indicators that satisfy needs is good and the indicators cover quite well. Aspects: The accuracy of policy indicators and according to planning is good.

Keywords: Order, market, street vendors.

PENDAHULUAN

Secara umum pasar merupakan suatu tempat dimana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat memperoleh uang sebagai gantinya. Disana penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Namun terkadang ketersediaan tempat terbatas yang mana tidak bisa memenuhi banyaknya jumlah pedagang menyebabkan pedagang memilih berjualan di pinggir jalan secara lesehan dengan cara menggelar alas untuk barang dagangan yang akan ditawarkan kepada pembeli atau bisa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sebutan bagi penaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah PKL juga dipakai untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Para pedagang itu menggunakan ruas jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat berdagang atau berjualan. Oleh karena itu hal tersebut dianggap mengganggu lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 24 ayat 2 dijelaskan bahwa “ setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan.”

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak teratur ini menurut penulis sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dan masyarakat. Seperti halnya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dipasar Candi ini yang mana menurut penulis mengganggu karena tempat mereka untuk berjualan merupakan tempat yang tidak seharusnya dan melanggar peraturan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 dalam pasal 24 ayat 2 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Adapun fenomena-fenomena masalah mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran para pedagang untuk mematuhi kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 24 ayat 2 karena masih adanya para pedagang yang mengabaikan kebijakan tersebut dan melanggar aturan dengan tetap berjualan di badan jalan.
2. Tidak tersedianya tempat parkir dan kurangnya kesadaran para pembeli yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan di depan lapak penjual sehingga menyebabkan kemacetan.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini, karena berdasarkan pengamatan masih terdapat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan meskipun sudah pernah dilakukan proses penertiban.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR CANDI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**”

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?(Affrian, Sos and AP, 2023)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Penelitian dilakukan di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah: (1) Kurangnya kesadaran para pedagang untuk mematuhi kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 24 ayat 2 karena masih adanya para pedagang yang mengabaikan kebijakan tersebut dan melanggar aturan dengan tetap berjualan di badan jalan. (2) Tidak tersedianya tempat parkir dan kurangnya kesadaran para pembeli yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan di depan lapak penjual sehingga menyebabkan kemacetan. (3) Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini, karena berdasarkan pengamatan masih terdapat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan meskipun sudah pernah dilakukan proses penertiban.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik: Observasi (pengamatan), wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Analisa data dalam penelitian ini yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

a. Hasil yang diinginkan

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa hasil yang diinginkan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah sudah baik karena menciptakan kenyamanan kepada para pedagang, masyarakat dan pengendara lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.

Hal ini sesuai dengan teori dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama, yaitu efektivitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil sesungguhnya dicapai.

b. Tujuan

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik karena bertujuan menjaga arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang menyebabkan masyarakat sekitar maupun pengendara lalu lintas merasa terganggu.

Hal ini sesuai dengan teori dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama, yaitu efektivitas berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil sesungguhnya dicapai.

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

a. Usaha yang diperlukan

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti mengenai usaha yang diperlukan, dapat disimpulkan bahwa usaha yang diperlukan di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik karena adanya kendala yang membolehkan berdagang ditempat itu dan sudah lama tidak dilakukan penertiban sehingga para pedagang tetap berdagang disana. Dalam penertiban dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk regu yang terdapat 6 sampai 7 orang. Menjawab fenomena ketiga.

Hal ini tidak sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

b. Manfaat Bersih

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, manfaat bersih sudah baik agar jalanan tidak sempit sehingga pedagang merasa nyaman jika arus lalu lintas lancar dan tidak terjadi kemacetan maka perlu adanya tempat parkir agar para pembeli tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan. Menjawab fenomena kedua.

Hal ini sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

a. Pencapaian Hasil

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil masih belum baik. Karena masih adanya para Pedagang Kaki Lima di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hanya mentaati peraturan pada saat petugas berada dilokasi dan kembali melanggar jika petugas sudah pergi dari lokasi.

Hal ini tidak sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

b. Efektivitas Tetap

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai efektivitas tetap di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum baik. Karena belum terlaksana secara efektif, dimana masih ada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan pada saat petugas tidak berada dilokasi. Menjawab fenomena pertama.

Hal ini tidak sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pemerataan

Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik sudah merata sesuai dengan asas keadilan.

a. Manfaat Merata Pada Kelompok

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam manfaat yang merata sudah baik. Karena sudah dapat dirasakan manfaat dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan adanya penertiban di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mereka merasakan kelancaran dalam berdagang jika arus lalu lintas juga lancar.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik secara merata sesuai dengan asas keadilan.

b. Pelayanan Publik

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan mengenai pelayanan sudah cukup baik. Karena pedagang kaki lima merasa pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara masih secara baik ramah dan sopan tidak dengan kekerasan seperti merusak-rusak dagangan milik PKL.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik secara merata sesuai dengan asas keadilan.

Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan.

a. Hasil Kebijakan Memuaskan Kebutuhan

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik. Karena para Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusaha melakukan penertiban sesuai dengan kebijakan dari peraturan daerah untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

b. Mencakup

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik. Dikarenakan sudah sesuai dan mencakup dalam pelaksanaannya. Dimana itu berguna untuk kenyamanan para pedagang kaki lima dan lalu lintas agar terhindar dari kemacetan.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Ketepatan berkenaan dengan apakah sebuah program atau kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang dicapai benar-benar berguna sesuai yang direncanakan.

a. Kebijakan

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik. Karena para Satpol PP melakukan kegiatan penertiban sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Ketepatan berkenaan dengan apakah sebuah program atau kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang dicapai benar-benar berguna sesuai yang direncanakan.

b. Sesuai Perencanaan

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pelaksanaan penertiban yang sudah sesuai dengan perencanaannya itu sudah baik. Karena berjalan sesuai dengan perencanaan awal yaitu untuk kenyamanan masyarakat termasuk pedagang kaki lima.

Hal ini sudah sesuai dengan teori William Dunn dalam Firyal Akbar (2018:18) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria yaitu Ketepatan berkenaan dengan apakah sebuah program atau kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang dicapai benar-benar berguna sesuai yang direncanakan.

Faktor yang mempengaruhi Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara: *Pertama*, Faktor Penghambat yaitu adanya kendala dalam proses penertiban, masih adanya PKL yang mentaati peraturan hanya saat ada petugas dan belum terlaksana secara efektif. *Kedua*, Faktor Pendukung yaitu adanya hasil yang diinginkan, tujuan, manfaat bersih, manfaat merata pada kelompok, sesuai dengan pelayanan yang diberikan, hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, dilaksanakan sesuai ketetapan pemerintah, sesuai dengan kebijakan yang bernilai dan sesuai dengan perencanaan.

SIMPULAN

Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari indikator: *Pertama* pada aspek Efektivitas diketahui indikator hasil yang diinginkan dan tujuan sudah baik. *Kedua* pada aspek Efisiensi diketahui indikator usaha yang diperlukan belum baik dan indikator manfaat bersih sudah baik. *Ketiga* pada aspek Kecukupan diketahui indikator pencapaian hasil dan indikator efektivitas tetap belum baik. *Keempat* pada aspek Pemerataan diketahui indikator manfaat merata pada kelompok sudah baik dan indikator pelayanan publik cukup baik. *Kelima* pada aspek Responsivitas diketahui indikator hasil kebijakan memuaskan kebutuhan sudah baik dan indikator mencakup cukup baik. *Keenam* pada aspek Ketepatan diketahui indikator kebijakan dan indikator sesuai perencanaan sudah baik. Adapun faktor yang mempengaruhi Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara: *Pertama*, Faktor Penghambat yaitu

adanya kendala dalam proses penertiban, masih adanya PKL yang mentaati peraturan hanya saat ada petugas dan belum terlaksana secara efektif. *Kedua*, Faktor Pendukung yaitu adanya hasil yang diinginkan, tujuan, manfaat bersih, manfaat merata pada kelompok, sesuai dengan pelayanan yang diberikan, hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, dilaksanakan sesuai ketetapan pemerintah, sesuai dengan kebijakan yang bernilai dan sesuai dengan perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.